

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI

Titi rawati Gulo¹, Rosalia Mendrofa², Elazhari³

^{1,2,3}Univesitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

*Corresponding Author: titirawatig15@gmail.com

Abstrak

Melampaui batas-batas lokalitas internal desa, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan mengatur diri sendiri, mempunyai hukum adat sendiri, dan kemampuan atau kapasitas sumber daya lokal. Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas sumber daya lokal akan melahirkan kemandirian desa, yakni dalam urusan pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola berbagai sumber daya sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh masyarakat desa. Kemandirian merupakan kekuatan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan umum dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Adapun saran adalah Perlunya penambahan personil khususnya untuk pengelolaan perpustakaan sehingga kebutuhan teknis tidak dilakukan oleh guru kelas yang sudah mempunyai tugas utama. Selain itu, perlu adanya pengembangan program agar tidak terjadi kebosanan pada siswa dan disarankan juga untuk melakukan evaluasi pada program yang telah berjalan agar dapat dilihat keefektifan sebuah program untuk tujuan tertentu.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Teori Administrasi

Abstract

Beyond the boundaries of the village's internal locality, village autonomy contains the principle of freedom to self-regulate, having its own customary law, and local resource capabilities or capacities. The integration of local resource freedom and capacity will give birth to village independence, namely in government affairs, making decisions, and manage various resources in accordance with the preferences desired by the village community. Independence is the strength or improvement in the quality of village government administration, village development, development of local initiatives and potential, public services and the quality of life of village communities in a sustainable manner. The suggestion is that additional personnel are needed, especially for library management so that technical needs are not carried out by class teachers who already have the main task. Apart from that, it is necessary to develop programs to prevent boredom among students and it is also recommended to carry out evaluations on programs that are already running so that the effectiveness of a program can be seen for certain purposes.

Keywords: Implementation, Public Policy, Administrative Theory

PENDAHULUAN

Tahapan sebuah kebijakan tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni, Tahapan pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni, Penyiapan sumber daya, unit dan metode, Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterimakan dijalankan, Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah tentang tahapan kebijakan. Untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka dalam makalah ini masalahnya dibatasi pada 1. Pengertian tahapan kebijakan, 2. Sistematis pembuatan kebijakan, 3. Kebijakan publik

Pada dasarnya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama. Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengertian tahapan kebijakan, 2. Untuk mengetahui sistematis kebijakan, 3. Untuk mengetahui tentang kebijakan publik

PEMBAHASAN

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan, adapun keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut:

Penyusunan Agenda, Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: a. Telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak dramatis; c. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; d. Menjangkau dampak yang amat luas ; e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; f. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

1. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan,

dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

2. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.

3. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

a. Evaluasi Kebijakan

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa hal yang akan dibahas yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, dimana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Secara garis besar, proses evaluasi terbagi menjadi di awal (*pretest*) dan diakhir (*posttest*). *Pretest* merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sedangkan, *posttest* merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisa situasi berikutnya. Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang di laksanakan agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya (Dwijowijoto, 2003:158). Dijelaskan oleh putt dan springer implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujudke dalam paktik organisasi. Tangkilisan (2003:11) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan sejumlah keputusan dan tindakan oleh kepala sekolah. ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi, sumber, disposisi, atau sikap dan struktur birokrasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplemntasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan publik tersebut.

c. Komunikasi

Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kebijakan. Itu artinya pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan agar memahami kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya, maka untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, namun kebijakan yang di laksanakan bagi mereka harus juga jelas.

d. Sumber Daya

Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan, tetapi kalau sumber daya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Adapun pentingnya sumber daya ini mencakup: jumlah staf yang tepat, keahlian yang di perlukan, informasi yang relevan tentang cara melaksanakan kebijakan dan berbagai penyesuaian lainnya. Jika sumber daya tidak

cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat dibumikan dalam memenuhi tujuan dan harapan stakeholders atau pelanggan.

e. Disposisi

Disposisi atau sikap di sini dimaksudkan adalah sikap pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya memang harus terdorong sepenuh hati atau memiliki komitmen melaksanakan kebijakan tersebut. Disini diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan memenuhi tujuan pribadi dan tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

f. Struktur Birokrasi

Bila para pelaksana sudah tahu apa yang akan dikerjakan karena sudah dikomunikasikan dan mau melaksanakan namun kadang terhambat karena struktur birokrasi. Masalah koordinasi menjadi faktor struktur birokrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Karena dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan.

Ada beberapa variabel yang termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu, 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator, 3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 4. Kecenderungan (dispotision) dari pelaksana implementator.

g. Monitoring Program

Monitoring mencakup pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan atau aktivitas bprogram. Informasi tersebut mencakup dua jenis utama, yaitu, 1. Masukan adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaksana aktivitas program. Anggaran biaya dan waktu merupakan masukan dasar pelayanan sebagai pengukuran efisiensi. 2. Hasil adalah produk dari aktivitas program. Sejumlah kasus proses, jumlah hambatan, jumlah hambatan pernyataan kalimat, dan keempat adalah contoh ukuran hasil pelayanan sebagai indikator efektivitas.

Monitoring pprogram juga mencakup pengembangan indikator kinerja yang terstandar dan sistem pelaporan. Selain itu monitoring program pun sebagai proses manajemen yang memerlukan data maka ada proses pelaporan yang diatur oleh manajemen untuk memudahkan proses penilaian pihak manajemen puncak.

h. Evaluasi Pengaruh

Evaluasi pengaruh dilaksanakan untuk menentukan tingkatan pencapaian kebijakan yang sesuai sasaran. Evaluasi pengaruh adalah lebih dari pengembangan monitoring program, yang berarti pengaruh evaluasi ini adalah berkenaan dengan fokus perubahan dalam hak sosial dan kondisi fisik. Secara ideal pengaruh evaluasi memberikan lebih dari suatu deskripsi dari perubahan dalam pengukuran sasaran program implementasi. Dan juga analisis usaha merancang kajian bahwa membiarkan mereka menerntukan berapa banyak perubahan ini dicirikan dalam kebijakan yang dievaluasi secara baik.

i. Evaluasi Proses

Evaluasi proses adalah menentukan mengapa program dilaksanakan pada level ini dan apakah dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi proses ini berkenaan dengan identifikasi jaringan khusus antara aktivitas pelaksanaan kebijakan dengan kinerja program. 1. Evaluasi formulasi kebijakan yakni a) Menggunakan pendekatan, b) Mengarah pada masalah inti, c) Mengikuti prosedur yang telah disepakati, d) Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal. 2. Model evaluasi formulasi kebijakan yakni a. Model kelembagaan, b. Model proses, c. Model kelompok c. Model elit, d. Model rasional, e. Model inkremental.

PENUTUP

Jadi Kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian adanya otonomi Desa, Otonomi desa tidak bisa lepas dari konteks hubungan pemerintahan antara desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari Negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan desa. Khususnya pemerintah desa, mempunyai hak bila berhadapan dengan Negara atau pemerintah tingkat atasnya, sebaliknya pemerintah desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat desa.

Melampaui batas-batas lokalitas internal desa, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan mengatur diri sendiri, mempunyai hukum adat sendiri, dan kemampuan atau kapasitas sumber daya lokal. Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas sumber daya lokal akan melahirkan kemandirian desa, yakni dalam urusan pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola berbagai sumber daya sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh masyarakat desa. Kemandirian merupakan kekuatan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan umum dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Adapun saran adalah Perlunya penambahan personil khususnya untuk pengelolaan perpustakaan sehingga kebutuhan teknis tidak dilakukan oleh guru kelas yang sudah mempunyai tugas utama. Selain itu, perlu adanya pengembangan program agar tidak terjadi kebosanan pada siswa dan disarankan juga untuk melakukan evaluasi pada program yang telah berjalan agar dapat dilihat keefektifan sebuah program untuk tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

[Volksraad: Makalah Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Pembangunan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Era Otonomi Daerah \(cayaharagma.blogspot.com\)](http://cayaharagma.blogspot.com)

[Makalah Kebijakan Publik \(Ilmu ADM NEGARA\) - DUNIA DALAM GENGAMAN \(sedaobagann.blogspot.com\)](http://sedaobagann.blogspot.com)